Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah  SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI  DASAR HUKUM:  1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM;	NOMOR SOP  TANGGAL PEMBUATAN  TANGGAL REVISI  TANGGAL EFEKTIF  DISAHKAN OLEH  NAMA SOP  KUALIFIKASI PELAKSANA  1. Memiliki kemampuan pen 2. Memahami proses pengan 3. Memiliki kemampuan ana	ngoprasian MS Office. nggaran.		
4. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham.  KETERKAITAN:  1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Penyusunan Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)  PERINGATAN:	PERALATAN / PERLENGKA  1. Komputer yang dilengkap 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor  PENCATATAN DAN PENDAN	i Microsoft office		
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat berakibat kinerja anggaran tahunan tidak akan berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai arsip			

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN / KALENDER KERJA

	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Keterangan	
No		Kepala Badiklat	Kasi Program & Evaluasi	Pelaksana/ JF	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Balai memerintahkan Kasi Program dan Evaluasi untuk menyiapkan rencana kegiatan / kalender tahunan.				Disposisi	20 menit	Disposisi	
2	Kasi Program dan Evaluasi menyiapkan konsep rencana kegiatan / kalender tahunan.		+		Disposisi, Konsep kegiatan/kalender kerja	1 jam	Disposisi, Konsep kegiatan/kalender kerja	
3	Kasi Program dan Evaluasi menugaskan Pelaksana/JF untuk menyusun konsep rencana kegiatan / kalender tahunan.			<b>†</b>	Disposisi, Konsep kegiatan/kalender kerja	1 jam	Disposisi, Konsep kegiatan/kalender kerja	
4	Kasi Program dan Evaluasi mengoreksi konsep rencana kegiatan / kalender tahunan. Jika disetujui akan diserahkan ke Kepala Balai, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.	Ya		Tidak	Disposisi, Konsep kegiatan/kalender kerja	30 menit	Disposisi, Konsep kegiatan/kalender kerja	
5	Kepala Balai mengoreksi konsep rencana kegiatan / kalender tahunan. Jika disetujui akan ditandatangani, jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.	Ya	Tidak		Disposisi, Konsep kegiatan/kalender kerja	30 menit	Disposisi, Konsep kegiatan/kalender kerja	
6	Pelaksana/JF menyampaikan rencana kegiatan / kalender tahunan ke BPSDM dan Kanwil Kemenkumham Jateng.				Surat dan rencana kegiatan/kalender kerja	30 menit	Rencana kegiatan/kalender kerja	
7	Kepala Balai menggunakan hasil penyusunan rencana kegiatan / kalender tahunan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.				Rencana kegiatan/kalender kerja			